



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMANUEL SEMBIRING**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **5043**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/720 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/120 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **19.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **40.290.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **180.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **759.348.770**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **4.948.638.770**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **4.948.638.770**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.